

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglarang Melalui *Forum Group Discussion (FGD)*

Dhimas Setyo Nugroho¹, Arif Dwi Saputra², Fuadi Afif³, Amelia Tri Wahyuni⁴, *Hary Hermawan⁵

¹Universitas Terbuka, Yogyakarta, Indonesia

²⁻⁵Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA, Yogyakarta, Indonesia, email: haryhermawan8@gmail.com



| Informasi artikel | ABSTRAK |
|--|---|
| Sejarah artikel Diterima : 21 Februari 2025 Revisi : 10 Juni 2025 Dipublikasikan : 15 Juli 2025 | Pengelolaan desa wisata berbasis komunitas merupakan elemen kunci dalam menciptakan keberlanjutan industri pariwisata lokal. Artikel ini membahas hasil dari Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan di Desa Wisata Nglarang dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Kegiatan ini melibatkan akademisi, praktisi, serta masyarakat setempat dalam merumuskan strategi pengelolaan berbasis komunitas. Kampung Wisata Rejowinangun dijadikan studi kasus dalam diskusi untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan wisata berbasis klaster ekonomi. Hasil FGD menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan sinergi antara pemangku kepentingan berperan penting dalam pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Melalui diskusi interaktif, dihasilkan rencana tindak lanjut berupa strategi peningkatan kapasitas masyarakat, pembentukan sistem klaster ekonomi, serta penguatan kemitraan dengan akademisi dan sektor swasta. Implementasi pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan Desa Wisata Nglarang sebagai destinasi wisata yang mandiri dan berkelanjutan. |
| Kata kunci: Pengelolaan Desa Wisata Community-Based Tourism Partisipasi Masyarakat Forum Group Discussion Ekowisata | ABSTRACT <i>Enhancing Community Participation in the Management of Nglarang Tourism Village Through Forum Group Discussion (FGD)</i> Community-based tourism village management is a key element in ensuring the sustainability of the local tourism industry. This article discusses the outcomes of a Forum Group Discussion (FGD) held in Nglarang Tourism Village, aimed at increasing community awareness and participation in tourism management. The event involved academics, practitioners, and local communities in formulating community-based tourism management strategies. Rejowinangun Tourism Village was used as a case study to demonstrate the success of economic sector clustering in tourism management. The FGD results indicate that active community participation and synergy among stakeholders are crucial in achieving sustainable tourism management. Through interactive discussions, an action plan was developed, including capacity-building programs, the establishment of an economic clustering system, and strengthened partnerships with academia and the private sector. The implementation of this approach is expected to transform Nglarang Tourism Village into a self-sustaining and sustainable tourism destination. |
| Keywords: Tourism Village Management Community-Based Tourism Community Participation Forum Group Discussion Ecotourism | |

Pendahuluan



Pariwisata berbasis masyarakat atau Community-Based Tourism (CBT) merupakan konsep pengelolaan wisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam merencanakan, mengelola, serta mengambil manfaat dari aktivitas wisata di wilayah mereka (Okazaki, 2008). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi lokal dan memastikan bahwa manfaat ekonomi, sosial, serta budaya dapat dirasakan langsung oleh komunitas setempat (Lind & Simmons, 2017). Konsep ini semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan industri pariwisata, di mana partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk menjaga kelangsungan dan daya saing desa wisata.

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah telah mengembangkan berbagai program desa wisata untuk memperkuat ekonomi lokal. Salah satu contoh keberhasilan penerapan CBT dapat ditemukan di berbagai desa wisata di Yogyakarta, seperti Kalibiru dan Lopati, yang berkembang pesat berkat peran serta masyarakat dalam menjaga nilai-nilai lokal dan mengelola wisata berbasis kearifan lokal (Vitasurya, 2016). Namun, banyak desa wisata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi wisata, keterbatasan dalam manajemen destinasi, hingga tantangan dalam mempertahankan keaslian budaya setempat. Dalam beberapa kasus, perkembangan pariwisata yang tidak dikelola dengan baik justru menimbulkan dampak negatif, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan perubahan sosial yang tidak terkontrol (Sutawa, 2012).

Salah satu desa wisata yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas adalah Desa Wisata Nglarang. Sebelum pandemi Covid-19, desa ini mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan, namun setelah pandemi, kunjungan wisata menurun drastis, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata pun turut berkurang. Sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pembangunan desa wisata sering kali terhambat oleh kurangnya strategi pengelolaan yang berkelanjutan dan minimnya keterlibatan aktif masyarakat (Nicholas, Thapa, & Ko, 2009), diperlukan upaya untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan desa wisata secara mandiri.

Dalam konteks ini, Forum Group Discussion (FGD) menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. FGD memungkinkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat, untuk berdiskusi serta berbagi pengalaman dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Studi dari berbagai desa wisata di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan wisata dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap destinasi wisata serta memperkuat daya saing desa dalam menarik wisatawan (Hampton, 2005).

Selain itu, pembelajaran dari Kampung Wisata Rejowinangun dapat menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan wisata berbasis komunitas dapat diterapkan secara efektif. Desa ini telah berhasil mengembangkan sistem klasterisasi ekonomi yang memungkinkan berbagai sektor wisata berkembang secara spesifik dan profesional. Dengan mengadopsi strategi serupa, Desa Wisata Nglarang dapat memperkuat potensi wisata yang dimilikinya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan desa wisata melalui pendekatan partisipatif. Dengan adanya FGD sebagai wadah diskusi dan berbagi pengalaman, diharapkan masyarakat Desa Wisata Nglarang dapat lebih memahami potensi wisata yang mereka miliki serta mampu mengelolanya secara mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang dan urgensi yang telah dijelaskan, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran serta mereka dalam pengelolaan desa wisata berbasis komunitas; (2) Memberikan wawasan tentang strategi sukses dalam pengelolaan desa wisata melalui studi kasus Kampung Wisata Rejowinangun; (3) Mendorong sinergi antara berbagai pihak, seperti akademisi, pengelola wisata, dan masyarakat dalam merancang strategi pengembangan desa wisata yang lebih inovatif dan berkelanjutan; (4) Menyusun rencana tindak lanjut berupa kemitraan antara Desa Wisata Nglarang dan Kampung Wisata Rejowinangun guna memperkuat ekosistem pariwisata berbasis masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Wisata Nglarang dapat lebih aktif dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang dimiliki sehingga mampu bersaing sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan mandiri.

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Nglarang. Metode yang digunakan mencakup observasi lapangan, pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD), studi banding, serta evaluasi pasca-kegiatan guna memastikan efektivitas program yang dijalankan.

Observasi Lapangan, observasi dilakukan sebagai langkah awal dalam memahami kondisi terkini Desa Wisata Nglarang, termasuk potensi wisata, tantangan yang dihadapi, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei langsung dengan menggunakan instrumen seperti kuesioner dan wawancara mendalam.

Kuesioner disebarikan kepada warga setempat, pelaku usaha wisata, serta pengelola desa wisata untuk menggali informasi terkait pengalaman mereka dalam mengelola destinasi wisata. Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan utama guna mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai potensi dan permasalahan desa wisata. Selain itu, dilakukan dokumentasi berupa foto dan video kondisi fisik infrastruktur wisata, fasilitas pendukung, serta interaksi wisatawan yang berkunjung ke desa.

Data yang diperoleh dari observasi ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Temuan dari tahap observasi menjadi dasar dalam penyusunan agenda diskusi pada FGD serta rekomendasi strategi yang akan diusulkan untuk meningkatkan pengelolaan desa wisata.

Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD), diadakan sebagai wadah interaksi antara akademisi, praktisi pariwisata, pengelola desa wisata, serta masyarakat Desa Wisata Nglarang. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali perspektif dari berbagai pihak mengenai strategi pengelolaan wisata berbasis komunitas serta menyusun langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Pelaksanaan FGD diikuti oleh 30 peserta yang terdiri atas perwakilan akademisi dari Universitas Terbuka dan Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA, praktisi pariwisata dari Kampung Wisata Rejowinangun, serta warga Desa Wisata Nglarang yang terdiri atas pengelola wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku usaha lokal, dan tokoh masyarakat. FGD dilaksanakan dalam dua sesi utama yang masing-masing berlangsung selama dua jam. Sesi pertama berfokus pada pemaparan materi dari narasumber mengenai konsep Community-Based Tourism (CBT), strategi pengelolaan wisata berbasis klaster, serta pengalaman dari Kampung Wisata Rejowinangun dalam mengembangkan wisata berbasis komunitas. Materi ini disampaikan secara interaktif dengan menggunakan presentasi visual dan studi kasus yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi peserta.

Sesi kedua terdiri atas diskusi kelompok di mana peserta dibagi menjadi beberapa tim kecil untuk membahas isu-isu spesifik terkait pengelolaan desa wisata, seperti peningkatan daya tarik wisata, strategi pemasaran berbasis digital, dan mekanisme pendanaan berbasis komunitas. Setiap kelompok diberikan lembar kerja untuk merumuskan solusi dan strategi yang dapat diterapkan di Desa Wisata Nglarang. Hasil diskusi dari masing-masing kelompok kemudian dipresentasikan di depan forum, diikuti dengan sesi tanya jawab dan tanggapan dari para narasumber.

Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan, untuk mengukur efektivitas FGD, dilakukan evaluasi melalui survei kepuasan peserta dan analisis dampak implementasi strategi yang dibahas dalam forum. Survei kepuasan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta setelah FGD berakhir. Kuesioner ini mencakup aspek-aspek seperti pemahaman terhadap materi yang disampaikan, relevansi diskusi dengan permasalahan desa wisata, serta kesiapan masyarakat dalam menerapkan strategi yang telah dirumuskan.

Selain survei, evaluasi juga dilakukan melalui pemantauan jangka panjang terhadap implementasi hasil FGD dalam pengelolaan Desa Wisata Nglarang. Pendampingan lanjutan akan diberikan bagi kelompok yang telah menyusun strategi untuk mengembangkan sektor wisata tertentu, seperti kuliner, ekowisata, atau atraksi budaya. Dalam tiga bulan pasca-kegiatan, dilakukan wawancara lanjutan dengan pengelola desa wisata untuk mengukur dampak implementasi strategi yang telah dirancang.

Dari hasil evaluasi ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana FGD memberikan kontribusi terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Temuan dari evaluasi ini juga akan menjadi bahan refleksi untuk menyusun program pendampingan yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan pendekatan metode yang sistematis dan berbasis partisipasi masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengelola Desa Wisata Nglarang dalam mengembangkan wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan desa wisata berbasis komunitas merupakan aspek krusial dalam menciptakan keberlanjutan sektor pariwisata. Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Desa Wisata Nglarang, terjadi peningkatan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif mereka dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata desa. Diskusi yang melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat ini tidak hanya membahas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan desa wisata, tetapi juga menghasilkan strategi konkret untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Dampak FGD terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan FGD memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam pengelolaan desa wisata. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pengelolaan wisata merupakan tanggung jawab pemerintah atau pihak luar. Namun, melalui diskusi dan pemaparan dari narasumber, masyarakat menjadi lebih memahami bahwa keberlanjutan desa wisata bergantung pada partisipasi aktif mereka dalam menjaga kelestarian alam, meningkatkan kualitas layanan wisata, serta berinovasi dalam menciptakan daya tarik wisata yang unik.

Menurut McCloskey et al. (2011), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata tidak hanya meningkatkan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas sosial dan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan hasil FGD, di mana masyarakat Desa Wisata Nglarang mulai menunjukkan minat untuk lebih aktif dalam merancang program wisata berbasis komunitas. Mereka mengusulkan beberapa inisiatif, seperti pengembangan paket wisata berbasis edukasi lingkungan serta pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha lokal.

Testimoni dari beberapa peserta FGD menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru bagi mereka. Seorang anggota Pokdarwis, misalnya, menyatakan bahwa sebelumnya mereka hanya fokus pada operasional harian tanpa memiliki strategi pengembangan jangka panjang. Namun, setelah mengikuti FGD, mereka menyadari pentingnya perencanaan yang sistematis dalam mengembangkan desa wisata. Sementara itu, seorang pelaku UMKM lokal menyatakan bahwa diskusi ini membuka peluang untuk berkolaborasi dengan sektor lain, seperti kuliner dan kerajinan, guna menciptakan pengalaman wisata yang lebih beragam bagi pengunjung.

Pembelajaran dari Kampung Wisata Rejowinangun

Salah satu bagian penting dalam FGD adalah berbagi pengalaman dari Kampung Wisata Rejowinangun yang telah sukses mengelola wisata berbasis komunitas sejak 2010. Kampung ini menerapkan sistem pengelolaan berbasis klaster yang memungkinkan setiap sektor wisata untuk berkembang secara spesifik dan terarah. Keberhasilan model ini didukung oleh perencanaan yang matang serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap aspek pengelolaan wisata.

Namun, keberhasilan ini tidak dicapai tanpa tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Kampung Wisata Rejowinangun adalah perubahan pola kunjungan wisatawan pasca-pandemi yang menyebabkan penurunan jumlah pengunjung. Untuk mengatasi tantangan ini, mereka mengembangkan strategi diversifikasi produk wisata, seperti wisata edukasi berbasis herbal dan ekowisata berbasis pertanian, yang mampu menarik segmen wisatawan baru. Selain itu, mereka juga mengoptimalkan pemasaran digital melalui media sosial dan platform wisata daring untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik kampung wisata ini.

Dalam sesi diskusi, Mas E'ED selaku perwakilan dari Kampung Wisata Rejowinangun berbagi pengalaman mengenai bagaimana sistem klasterisasi dapat diterapkan di desa wisata lain. Ia menekankan bahwa keberhasilan model ini bergantung pada pemetaan potensi desa yang komprehensif serta koordinasi yang baik antar sektor. Menurutnya, klasterisasi tidak hanya membantu dalam pengelolaan wisata, tetapi juga meningkatkan daya saing desa wisata dalam menarik wisatawan serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Strategi Implementasi di Desa Wisata Nglarang

Berdasarkan pembelajaran dari Kampung Wisata Rejowinangun, Desa Wisata Nglarang berencana untuk menerapkan pendekatan serupa guna meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain adalah pemetaan potensi desa untuk mengidentifikasi daya tarik wisata unggulan yang dapat dikembangkan lebih lanjut, pelatihan dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan wisata, pemasaran digital, serta manajemen keuangan.

Selain itu, pembentukan pengelola wisata berbasis klaster juga menjadi salah satu strategi utama yang akan diterapkan. Dengan membagi sektor wisata ke dalam beberapa klaster, seperti klaster ekowisata, kuliner, dan budaya, desa wisata dapat mengelola pengembangannya dengan lebih terstruktur. Kemitraan dengan akademisi, sektor swasta, dan desa wisata lain juga akan terus diperkuat guna mendukung keberlanjutan program yang telah dirancang dalam FGD.

Menurut Rasoolimanesh & Jaafar (2016), kemitraan yang kuat antara komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan kepercayaan, kredibilitas, serta mendukung keberlanjutan pariwisata desa. Dengan implementasi strategi ini, Desa Wisata Nglarang diharapkan dapat berkembang secara mandiri dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat.

Selain faktor pengelolaan internal, desa wisata juga perlu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif guna menarik lebih banyak wisatawan. Pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan platform pemasaran online dapat menjadi solusi untuk meningkatkan promosi wisata secara luas. Penggunaan media digital tidak hanya memberikan akses lebih besar kepada calon wisatawan tetapi juga memungkinkan desa wisata untuk membangun citra yang kuat dan meningkatkan interaksi dengan wisatawan melalui konten kreatif. Pemanfaatan teknologi ini telah terbukti efektif dalam mengembangkan desa wisata lain di Indonesia, seperti yang diterapkan di beberapa destinasi berbasis komunitas yang sukses mengadopsi pemasaran berbasis digital (Vitasurya, 2016).

Dengan strategi implementasi yang sistematis serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Desa Wisata Nglarang dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan, mandiri, serta mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat. Keberhasilan desa wisata tidak hanya bergantung pada daya tarik destinasi, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola serta mempertahankan keberlanjutan wisata yang mereka miliki.

Tantangan dan Rencana Tindak Lanjut untuk Desa Wisata Nglarang

Hasil dari Forum Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan di Desa Wisata Nglarang memberikan berbagai masukan strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Untuk memastikan bahwa hasil diskusi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, diperlukan langkah konkret berupa pelatihan, pendampingan, serta strategi pendanaan yang memungkinkan desa wisata untuk berkembang secara mandiri.

Sebagai tindak lanjut, pelatihan bagi masyarakat akan difokuskan pada peningkatan kapasitas dalam bidang pengelolaan wisata berbasis komunitas, strategi pemasaran digital, serta manajemen

keuangan usaha wisata. Pelatihan ini akan melibatkan akademisi, praktisi pariwisata, serta pelaku usaha yang telah berhasil mengembangkan wisata berbasis komunitas di desa lain. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aspek teknis dalam pengelolaan destinasi wisata, termasuk cara mengelola layanan wisata, meningkatkan kualitas produk lokal, serta mengembangkan strategi promosi yang efektif.

Pendampingan lanjutan juga akan dilakukan dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pengelola wisata, anggota kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta perwakilan pelaku usaha lokal. Kelompok ini akan bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi strategi yang telah dirancang dalam FGD serta memastikan adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Pendampingan dari akademisi dan praktisi akan dilakukan secara berkala guna memberikan arahan dan evaluasi terhadap progres yang telah dicapai.

Dalam sesi diskusi interaktif, salah satu tantangan utama yang diangkat adalah keterbatasan pendanaan dalam pengelolaan desa wisata. Arif Dwi Saputra mempertanyakan bagaimana sumber pendanaan dapat diperoleh tanpa ketergantungan pada dana pemerintah. Menanggapi hal ini, Mas E'ED dari Kampung Wisata Rejowinangun menekankan pentingnya kemandirian finansial melalui swadaya masyarakat dan kemitraan strategis dengan sektor swasta. Sejalan dengan temuan Tosun (2000), desa wisata sering menghadapi keterbatasan dalam partisipasi finansial karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, Desa Wisata Nglarang berencana menjalin kerja sama dengan Kampung Wisata Rejowinangun untuk mengadopsi sistem pengelolaan berbasis klaster.

Untuk memastikan keberlanjutan program, salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah sumber pendanaan jangka panjang bagi desa wisata. Berdasarkan pengalaman desa wisata lain, skema pendanaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk swadaya masyarakat, dana hibah dari pemerintah daerah, serta kerja sama dengan sektor swasta. Desa Wisata Nglarang dapat mengajukan proposal ke program bantuan desa wisata yang disediakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan wisata berbasis komunitas. Selain itu, kemitraan dengan lembaga keuangan mikro atau koperasi dapat menjadi alternatif dalam menyediakan modal usaha bagi masyarakat yang ingin mengembangkan produk wisata lokal.

Selain sumber pendanaan dari pemerintah dan sektor swasta, pemanfaatan dana desa juga dapat menjadi solusi untuk mendukung pengelolaan wisata berbasis komunitas. Pemerintah telah mengalokasikan dana desa untuk pengembangan ekonomi lokal, termasuk desa wisata, yang dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur wisata serta mendukung program pelatihan bagi masyarakat (Indrajit et al., 2021). Namun, untuk mengakses dana ini, diperlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa serta penyusunan rencana kerja yang jelas dan terukur.

Sejalan dengan diskusi yang dilakukan dalam FGD, beberapa langkah strategis yang diusulkan sebagai tindak lanjut meliputi pemetaan potensi desa guna mengidentifikasi daya tarik wisata unggulan yang dapat dikembangkan lebih lanjut, pelatihan dan edukasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan wisata, pemasaran digital, serta manajemen keuangan. Pembentukan pengelola wisata berbasis klaster juga menjadi strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata, dengan menyesuaikan sistem klasterisasi yang sesuai dengan potensi desa. Selain itu, kemitraan dan jaringan kerja akan terus diperluas dengan membangun kolaborasi dengan desa wisata lain, akademisi, serta sektor swasta untuk mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Menurut Rasoolimanesh & Jaafar (2016), kemitraan yang kuat antara komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan kepercayaan, kredibilitas, serta mendukung keberlanjutan pariwisata desa. Dengan implementasi strategi ini, Desa Wisata Nglarang diharapkan dapat berkembang secara mandiri dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat.

Selain faktor pendanaan, desa wisata juga perlu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif guna menarik lebih banyak wisatawan. Pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan platform pemasaran online dapat menjadi solusi untuk meningkatkan promosi wisata secara luas. Penggunaan media digital tidak hanya memberikan akses lebih besar kepada calon wisatawan tetapi

juga memungkinkan desa wisata untuk membangun citra yang kuat dan meningkatkan interaksi dengan wisatawan melalui konten kreatif. Pemanfaatan teknologi ini telah terbukti efektif dalam mengembangkan desa wisata lain di Indonesia, seperti yang diterapkan di beberapa destinasi berbasis komunitas yang sukses mengadopsi pemasaran berbasis digital (Vitasurya, 2016).

Dalam upaya memastikan keberlanjutan desa wisata, dukungan dari pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi dalam bentuk regulasi yang mendukung keberlanjutan desa wisata, seperti kebijakan perlindungan lingkungan, regulasi terkait usaha mikro dan kecil (UMK), serta skema insentif bagi desa wisata yang berkontribusi terhadap pelestarian budaya dan lingkungan (Sutawa, 2012). Selain itu, pemerintah daerah dapat membantu desa wisata dalam promosi melalui platform digital yang dikelola oleh dinas pariwisata setempat, sehingga desa wisata lebih mudah dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kemitraan dengan lembaga pendidikan juga dapat menjadi strategi yang bermanfaat dalam mendukung pengembangan desa wisata. Universitas dan sekolah tinggi pariwisata dapat berperan sebagai mitra dalam memberikan pelatihan serta melakukan penelitian terapan yang berkontribusi terhadap penguatan tata kelola desa wisata berbasis komunitas. Selain itu, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang berfokus pada pengembangan pariwisata dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam membantu desa wisata dalam aspek pemasaran, pengelolaan destinasi, serta inovasi produk wisata.

Agar program ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur sejauh mana program tindak lanjut yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan baik serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat, wawancara dengan pengelola desa wisata, serta analisis data kunjungan wisata. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, program pengelolaan desa wisata dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

Dengan strategi implementasi yang sistematis serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Desa Wisata Nglarang dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan, mandiri, serta mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat. Keberhasilan desa wisata tidak hanya bergantung pada daya tarik destinasi, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola serta mempertahankan keberlanjutan wisata yang mereka miliki.

Simpulan

Hasil Forum Group Discussion (FGD) di Desa Wisata Nglarang menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata berbasis komunitas memiliki peran krusial dalam menciptakan keberlanjutan destinasi wisata. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam pengelolaan wisata meningkat secara signifikan setelah kegiatan ini. FGD menjadi wadah efektif untuk membangun komunikasi antara masyarakat, akademisi, dan praktisi pariwisata, sehingga memungkinkan pertukaran pengalaman dan gagasan inovatif dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas.

Salah satu temuan penting dalam FGD adalah perlunya strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola wisata secara profesional. Pembelajaran dari Kampung Wisata Rejowinangun menunjukkan bahwa model pengelolaan berbasis klaster dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing desa wisata. Oleh karena itu, Desa Wisata Nglarang berencana mengadopsi pendekatan serupa dengan menyesuaikan klaster ekonomi yang sesuai dengan potensi lokalnya.

Selain itu, penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan desa wisata. Kerja sama dalam bidang pemasaran digital, inovasi produk wisata, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan program yang telah dirancang.

Sebagai rekomendasi, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk regulasi yang mempermudah akses pendanaan bagi desa wisata serta kebijakan yang mendukung inovasi dan keberlanjutan industri pariwisata berbasis komunitas. Dengan implementasi strategi yang telah disusun dalam FGD, diharapkan Desa Wisata Nglarang dapat berkembang menjadi destinasi wisata mandiri yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Terbuka, LPPM Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA, dan Desa Wisata Rejowinangun atas dukungan dan kontribusinya dalam suksesnya kegiatan Forum Group Discussion (FGD): Menumbuhkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Wisata Nglarang.

Kami juga mengapresiasi kerja keras Himpunan Mahasiswa Pariwisata (HIMASTA) Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA mbak Amelia Tri Wahyuni dan kawan-kawan sebagai panitia pelaksana yang telah mengorganisir acara ini dengan baik. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal bagi kolaborasi berkelanjutan dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat.

Referensi

- Gursoy, D., Jurowski, C., & Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. *Annals of Tourism Research*, 29(1), 79-105. [https://doi.org/10.1016/s0160-7383\(01\)00028-7](https://doi.org/10.1016/s0160-7383(01)00028-7)
- Hampton, M. P. (2005). Heritage, local communities and economic development. *Annals of Tourism Research*, 32(3), 735-759. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.10.010>
- Indrajit, A., van Loenen, B., Suprajaka, Jaya, V. E., Ploeger, H., Lemmen, C., & van Oosterom, P. (2021). Implementation of the spatial plan information package for improving ease of doing business in Indonesian cities. *Land Use Policy*, 105, 105338. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105338>
- Lind, D., & Simmons, D. (2017). Structured inter-network collaboration: Public participation in tourism planning in Southern China. *Tourism Management*, 63, 315-328. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.024>
- McCloskey, S., Rowe, J., & Saunders, C. (2011). Community participation in sustainable tourism development: A study of key success factors. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(5), 567-589.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. New York: Methuen.
- Nicholas, L. N., Thapa, B., & Ko, Y. J. (2009). Residents' perspectives of a world heritage site: The Pitons Management Area, St. Lucia. *Annals of Tourism Research*, 36(3), 390-412. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.03.005>
- Nicholas, L. N., Thapa, B., & Ko, Y. J. (2009). Residents' perspectives of a world heritage site: The Pitons Management Area, St. Lucia. *Annals of Tourism Research*, 36(3), 390-412. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.03.005>
- Nicholas, L. N., Thapa, B., & Ko, Y. J. (2009). Residents' perspectives of a world heritage site: The Pitons Management Area, St. Lucia. *Annals of Tourism Research*, 36(3), 390-412. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.03.005>
- Nugroho, D. S., Hermawan, H., Putri, E. D. H., & Mayasari, C. U. (2020). Community participation tourist attraction development in Jabal Kelor - a case study. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1). <https://doi.org/10.31219/osf.io/hcwge>
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511-529. <https://doi.org/10.1080/09669580802159594>

- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511-529. <https://doi.org/10.1080/09669580802159594>
- Rasoolimanesh, S. M., & Jaafar, M. (2016). Sustainable tourism development and residents' perceptions in World Heritage Site destinations. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 22(1), 34-48. <https://doi.org/10.1080/10941665.2016.1175491>
- Rasoolimanesh, S. M., & Jaafar, M. (2016). Sustainable tourism development and residents' perceptions in World Heritage Site destinations. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 22(1), 34-48. <https://doi.org/10.1080/10941665.2016.1175491>
- Suansri, P. (2003). *Community-based tourism handbook*. Thailand: Responsible Ecological Social Tour Project.
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development. *Procedia Economics and Finance*, 4, 413-422. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00356-5)
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development. *Procedia Economics and Finance*, 4, 413-422. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00356-5)
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613-633. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)
- Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493-504. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>
- Vitasurya, V. R. (2016). Local wisdom for sustainable development of rural tourism, case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 216, 97-108. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.014>

Author Biografi

Dhimas Setyo Nugroho, adalah akademisi Universitas Terbuka yang meneliti pariwisata berbasis masyarakat dan pengelolaan desa wisata berkelanjutan. Ia aktif dalam penelitian terkait ekowisata, strategi pemasaran destinasi, serta digitalisasi desa wisata. Publikasinya membahas faktor kepuasan wisatawan dan loyalitas dalam ekowisata serta inovasi pengembangan desa wisata berbasis komunitas.

Arif Dwi Saputra, adalah akademisi Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta dan praktisi pariwisata yang berfokus pada pengelolaan desa wisata dan manajemen destinasi berbasis komunitas. Ia aktif dalam penelitian sejarah dan geografi pariwisata.

Fuadi Afif, adalah seorang akademisi di Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta yang memiliki fokus penelitian dalam bidang pariwisata digital, produk ekowisata khususnya birdwatching dan forest bathing, serta pemasaran digital pariwisata. Ia juga merupakan praktisi fotografi yang mempunyai pengalaman lebih dari satu dasawarsa.

Amelia Tri Wahyuni, Ketua Himpunan Mahasiswa Pariwisata (HIMASTA) Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA

Hary Hermawan, adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA, dengan penelitian di bidang pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Ia terlibat dalam program pendampingan desa wisata dan penelitian mengenai strategi pengelolaan destinasi berbasis masyarakat, kepuasan wisatawan, serta ekonomi pariwisata.

